

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, S., Sawitri, S., & Yuwono, B. D. (2016). Analisis Perubahan Zona Nilai Tanah berdasarkan Harga Pasar untuk Menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Geodesi Undip*, 159-167.
- Aprianti, B. (2013). Penilaian Ulang Objek Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Peta Zona Nilai Tanah (Studi Kasus Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY. *Tugas Akhir*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. (2024). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman (Jiwa)*. Kabupaten Sleman: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.
- Bayhaki, S., Kurnia, D., & Yulianandha, M. (t.thn.). Pembuatan Zona Nilai Tanah Untuk Updating Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus : Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong).
- Condrosulistyo, R. (2024, Juli 17). Keadaan NJOP di Sleman. (N. A. Agustin, Pewawancara)
- Direktorat Jenderal Pajak. (1999). *Petunjuk Teknis Analisa Penentuan NIR sebagai Dasar Penentuan di Wilayah Kabupaten Bandung*. Bandung: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2006). *Penjelasan Tata Cara Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (2018, Desember 31). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Diambil kembali dari JDIIH BPK DATABASE PERATURAN: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/113747/pmk-no-208pmk072018>
- Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan. (2024, Juni 3). *Kuliah Umum Mahasiswa DEB SV UGM Praktik Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Sebagai Upaya untuk Mengurangi Kesenjangan di Indonesia*. (Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Pemain) Sleman.
- Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan. (2024). *Petunjuk Teknis Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan*. Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan.
- Haldenwang, C. V. (2015, Maret 1). *The Political Cost of Local Revenue Mobilisation: Decentralisation of the Property Tax in Indonesia*.

- Hidayati, A., Nurdialy, M., Patabang, M., Rosiana, N., & Juwita, S. (2024). Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB dan BPHTB di Kota Bogor. *Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*.
- Hidayati, W., & Budy, H. (2003). *Konsep Dasar Penilaian Properti*. Yogyakarta: BPFE.
- Kementerian Keuangan. (2010). *BPK JDIH DATABASE PERATURAN*. Diambil kembali dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNPB pada Badan Pertanahan Nasional: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164742/pmk-no-132pmk022010>
- Kementerian Perdagangan. (2017). *JDIH BPK DATABASE PERATURAN*. Diambil kembali dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128698/permendag-no-51m-dagper72017-tahun-2017>
- Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia. (2018). *KEPI & SPI*. Jakarta: MAPPI.
- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. (2024). *BIAYA TEKNIS BANGUNAN (BTB)*. Diambil kembali dari MAPPI: <https://member.mappi.or.id/btb>
- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. (2024). *MAPPI*. Diambil kembali dari Umur Ekonomis: <https://member.mappi.or.id/beritadetil-321-umur-ekonomis.html>
- Munanda, T. W., Murdapa, F., & Dewi, C. (2022). Perubahan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. *Journal of Geodesy and Geomatics*, 10-19.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. (2009). *JDIH BPK DATABASE PERATURAN*. Diambil kembali dari Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/16963/perda-kab-sleman-no-9-tahun-2009>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. (2012). *BPK JDIH DATABASE PERATURAN*. Diambil kembali dari Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 58 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Nilai Jual Bumi dan Bangunan Serta Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38713/perbup-kab-sleman-no-58-tahun-2012>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. (2016). *JDIH BPK DATABASE PERATURAN*. Diambil kembali dari Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/12441>

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. (2021). *BPK JDIH DATABASE PERATURAN*. Diambil kembali dari Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/219883/perda-kab-sleman-no-13-tahun-2021>

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. (2024). *JDIH BPK DATABASE PERATURAN*. Diambil kembali dari Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/279721/perbup-kab-sleman-no-7-tahun-2024>

Pemerintah Kapanewon Depok. (t.thn.). *KAPANEWON (KECAMATAN) DEPOK*. Diambil kembali dari SITUS RESMI KAPANEWON (KECAMATAN) DEPOK: <https://depok.slemankab.go.id/profile/peta-wilayah>

Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (1999). *JDIH BPK DATABASE PERATURAN*. Diambil kembali dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>

Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2007). *JDIH BPK DATABASE PERATURAN*. Diambil kembali dari Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>

Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2022). *BPK JDIH DATABASE PERATURAN*. Diambil kembali dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>

Pramana, A. E. (2017). Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Nilai Lahan Kawasan Perkotaan Yogyakarta Studi Kasus Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional XII "Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi 2017 Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta"* (hal. 405-413). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta.

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2016). *Evaluasi Pengalihan PBB P2 kepada Pemerintah Daerah*. Diambil kembali dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Rekyani, S. H. (2024, Juli 1). Wawancara Mengenai Penagihan PBB P2 setiap Kecamatan di Kabupaten Sleman. (A. N. Agustin, Pewawancara)

- Rosady, R. (2004). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sari, B. R., Subiyanto, S., & Suprayogi, A. (2019). Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Berbasis WebGIS di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. *Jurnal Geodesi Undip (JGU)*, 1-10.
- Sibarani, E., Lubis, D. P., & Rahmadi, M. (2021). PEMETAAN ZONA NILAI TANAH (ZNT) DI KELURAHAN TITI KUNING KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN (Mapping of Land Value Zones in Sub District Titi Kuning Medan Johor Districts Medan City). *Jurnal Sains Informasi Geografi*, 41-49.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO'S pada Globalisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subkhi, W. B., & Mardiansjah, I. H. (2019). Pertumbuhan dan Perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten: Studi Kasus Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 105-120.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Wolcott, R. (1987). *The Appraisal of Real Estate American Institute of Real Estate Appraiser*. North Michigan : Chicago Illinois.